



Pemkot Tinjau Ulang Potensi Pajak Hotel 2015

YOGYA (MERAPI) - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta kembali meninjau ulang potensi pajak hotel 2015 usai keluarnya peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang larangan pegawai negeri sipil menggelar rapat atau kegiatan di hotel.

"Ada perubahan pendapatan hotel pascakeluarnya aturan dari kementerian sehingga potensi pajak pun perlu ditinjau ulang," kata Kabag Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama (P3ADK) Pemerintah Kota Yogyakarta Danang Subagiono di Yogyakarta, Senin (9/3) seperti dilansir *Antara*.

Dia mengatakan kajian itu juga dilakukan karena Yogyakarta mengeluarkan moratorium izin pembangunan hotel baru.

Menurut dia, kegiatan serupa sudah dilakukan pada 2012 dan

diharapkan kegiatan kajian potensi pajak hotel pada tahun ini dapat digunakan untuk menetapkan perkiraan target pajak hotel dalam APBD tahun berikutnya.

P3ADK Pemerintah Kota Yogyakarta menganggarkan dana sekitar Rp 149 juta untuk peninjauan ulang potensi pajak hotel pada tahun ini. "Harapannya, pada bulan ini sudah ada pemenang lelangnya sehingga pekerjaan itu bisa segera dimulai," lanjutnya.

Selain melakukan studi potensi pajak hotel, Bagian P3ADK Kota Yogyakarta juga melakukan sejumlah kajian lain seperti kajian optimalisasi pungutan pajak restoran untuk pedagang kaki lima (PKL), kajian tarif retribusi jasa umum dan kajian tarif retribusi jasa usaha.

Pemerintah menganggarkan dana masing-masing Rp 50 juta untuk ketiga kajian itu. (*)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Perekonomian Pengemb. P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005